



## Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Terpadu Badan Usaha Milik Desa Bersama Sumberrejo Berkah Mandiri Sejahtera (SBMS) Lembaga Keuangan Desa (LKD) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro

**Nabilah Amellia Putri**  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Yusuf Hariyoko**  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Indah Murti**  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jalan Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota  
SBY, Jawa Timur 60118  
[nabilahnap03@gmail.com](mailto:nabilahnap03@gmail.com)

**Abstact.** *Community empowerment is one of the efforts to achieve community economic prosperity. Which is linked to issues of poverty and development. BUMDesma is a step from the government by collaborating with villages related to productive business and economy. The aim of this research is to identify Community Empowerment through the Management of BUMDesma Sumberrejo Berkah Mandiri Sejahtera (SBMS) Lkd Sumberrejo Bojonegoro District. The research method used is qualitative with descriptive methods. Based on the results and discussion using the ACTORS Theory by Sarah Cook and Steve Macualay, the resulting findings are that the authority is based on PDTT Ministerial Decree No.11 of 2021 and is already a legal entity. The formation of a business unit must be jointly approved through an Inter-Village Deliberation (MAD) as well as accountability for activities and financial management every 1 year. Capital participation from the village government and the private sector is very necessary to create new businesses apart from revolving funds (SPP) so optimal management is needed. BUMDesma is expected to achieve independence and create businesses where fifty-fifty is needed, meaning 50% of BUMDesma and 50% of the community. So there is a need for coordination and assistance or coaching.*

**Keywords:** *Community Empowerment, BUMDesma, Community Economic Welfare*

**Abstrak.** Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya mencapai kesejahteraan perekonomian masyarakat. Yang dikaitkan dengan isu kemiskinan dan pembangunan. BUMDesma merupakan langkah dari pemerintah dengan mengandeng desa-desa terkait usaha dan ekonomi produktif. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan BUMDesma Sumberrejo Berkah Mandiri Sejahtera (SBMS) Lkd Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro. Metode yang digunakan jenis penelitian yang ialah kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil dan pembahasan menggunakan Teori ACTORS oleh Sarah Cook and Steve Macualay temuan yang dihasilkan adalah kewenangan yang dimiliki berdasarkan Permendes PDTT No.11 Tahun 2021 dan sudah berbadan hukum. Pembentukan unit usaha harus disetujui secara bersama-sama melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) selain itu juga sebagai pertanggungjawaban kegiatan dan pengelolaan keuangan setiap 1 tahun. Penyertaan modal dari pemerintah desa maupun pihak swasta sangat diperlukan untuk menciptakan usaha baru selain dana bergulir (SPP) sehingga perlu pengelolaan yang optimal. BUMDesma diharapkan dapat mencapai kemandirian dan menciptakan usaha-usaha yang mana perlunya fifty-fifty artinya 50% BUMDesma dan 50% masyarakat. Sehingga perlunya koordinasi dan pendampingan atau pembinaan.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, BUMDesma, Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat

## **LATAR BELAKANG**

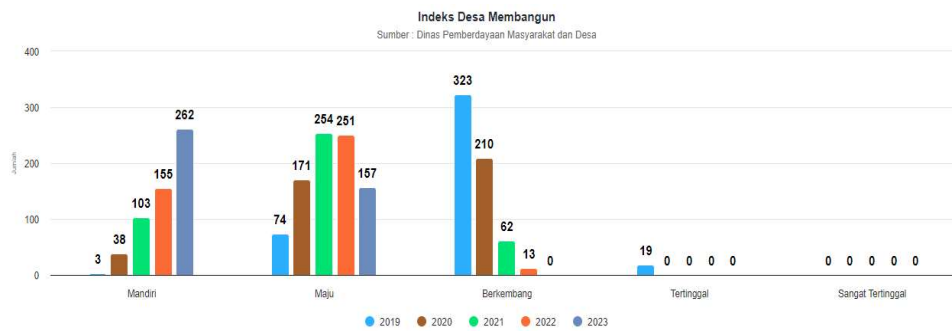
Pemberdayaan sejalan dengan tantangan pembangunan di Indonesia saat ini. Dimana pembangunan berporos pada perbaikan kehidupan dan penguatan sumber daya manusia. Badan Usaha Milik Desa Bersama atau disingkat menjadi Bumdesma keberadaannya dianggap sebagai salah satu pondasi dalam aktivitas ekonomi pedesaan yang perannya adalah sebagai lembaga sosial dan komersial. Pengelolaannya dalam keuangan dan usaha desa (sudah ada maupun yang baru didirikan) harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) agar lebih optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No.15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-Mpd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama merupakan langkah untuk menyelamatkan aset senilai Rp 12,7 triliun yang tersebar di 5.300 kecamatan dan mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir di tingkat desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu problem utama di negara Indonesia. Jumlah penduduk miskin berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 angka kemiskinan yang mencapai 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang. Dari informasi RKPD Bojonegoro 2023 penanganan kemiskinan ekstrem. *Authority* (wewenang), *Confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan), *Trust* (keyakinan), *Opportunities* (kesempatan), *Responsibilities* (tanggung jawab), *Support* (dukungan) adalah beberapa indikator dari Teori Pemberdayaan ACTORS yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa efektif pemberdayaan dalam membangun pemahaman dan keinginan untuk perubahan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat jika dikaitkan dengan Bumdes/Bumdes Bersama berkaitan erat dengan respons terhadap isu-isu pembangunan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Untuk menilai suatu indikator pemberdayaan, jenis-jenis dari intervensi masyarakat perlu dimasukkan ke dalam program karena kedudukannya sangat penting, terutama dalam pembangunan dan pemberdayaan sosial serta pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu yang mana intervensi masyarakat tersebut terbagi menjadi tiga yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial, dan aksi sosial (Rohtman, 1995 dalam (Hardiansyah et al., 2023)).

Teori ACTORS menekankan mengenai pendelegasian secara sosial juga moral terkait beberapa aspek diantaranya mendorong ketabahan, mendelegasikan wewenang sosial, mengatur kinerja, mengembangkan organisasi, menawarkan kerja sama, berkomunikasi secara efisien, mendorong inovasi, serta menuntaskan jika adanya masalah (Nabila, F. et al., 2022).

Pembentukan BumDes Bersama menjadi mekanisme yang diperlukan untuk mengatur pengelolaan dana bergulir secara kolektif oleh masyarakat desa. Dengan demikian, keputusan terkait penggunaan dana dan kegiatan yang didanai dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui pembentukannya masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan dana bergulir dan menentukan arah pembangunan di tingkat desa. Ini mencerminkan prinsip demokrasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan lokal. Sebagai Penguatan Kelembagaan yang mana dapat membantu dalam memperkuat kelembagaan di tingkat desa dan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya lokal. Dengan adanya badan usaha milik desa bersama, diharapkan akan terjadi peningkatan keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang ada.

Permasalahan yang ada di BUMDesma SBMS Lkd adalah kesulitan mendirikan usaha karena keterbatasan pembentukan usaha baru, modal dan keterlibatan masyarakat yang masih kurang. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengembangan usaha yang ada di Bumdesma. Untuk saat ini kegiatan yang berjalan ialah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kegiatan sosial tahunan (santunan anak yatim dan pembagian sembako). Sehingga Dana dari penyertaan modal tiap desa belum digunakan, jadi dana yang digunakan berasal dari Eks PNPM-Mpd, karena belum ada usaha lain yang didirikan. Dana program yang sudah dijalankan dan masuk ke Bumdesma sebanyak 0,7% dari bunga yang diberikan. Bumdesma dapat tepat pembentukannya apabila menggandeng beberapa desa yang memiliki banyak keterbatasan seperti permodalan, SDM, dan potensi. Kebersamaan dari beberapa desa diharapkan mampu memunculkan power-power baru yang lebih kuat yang menjamin keberlangsungan dan pengembangan maupun pendirian unit usaha baru serta bertujuan juga sebagai upaya mensejahterakan ekonomi masyarakat.



Gambar 1.1 Indeks Desa Membangun

Sumber: (Satu Desa Bojonegoro, 2023)

Dana pengelolaan yang masuk di BUMDesma saat ini masih digunakan untuk SPP yang mana dengan berjalannya waktu untuk mendapatkan modal dari desa-desa untuk mendirikan usaha baru. Hal ini dikarenakan BUMDesma di Kecamatan Sumberrejo masih baru bertransformasi dari Eks PNPM-Mpd pada Februari 2023. Usaha ini termasuk dalam pinjaman produktif karena sejak awal program ini tujuannya untuk memberdayakan masyarakat melalui pinjaman guna menciptakan usaha kelompok perempuan yang produktif dalam keluarga dengan maksud ke depan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Dari uraian diatas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan pada BUMDesma Sumberrejo Berkah Mandiri Sejahtera (SBMS) Lkd Kecamatan Sumberrejo Bojonegoro setelah bertransformasi yang sebelumnya UPK Eks PNPM-Mpd. Sehingga diperlukan indikator-indikator yang dapat menjawab terkait pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan sumberrejo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga penulis mengambil untuk judul penelitian adalah “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama Sumberrejo Berkah Mandiri Sejahtera (SBMS) Lkd Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”.

## KAJIAN TEORITIS

### Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dalam penelitian (Ramadani & Revida, 2022), Menurut Edi Suharto, makna pemberdayaan masyarakat adalah proses sekaligus tujuan. Secara umum, proses pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi yang semakin cepat. Upaya peningkatan kreatifitas masyarakat kurang mampu dalam mengenali peluang ekonomi sangat bergantung

pada keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh. Oleh karena itu, peningkatan kualitas masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Kemudian (Nugraha, 2020), UNICEF mengemukakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat diukur menggunakan indikator seperti kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Kelima dimensi ini selalu berubah (dinamis), saling mendukung, dan saling melengkapi.

Menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay dalam (Maani, D. K., 2011) mengatakan bahwa teori “ACTORS” tentang pemberdayaan melihat masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan melalui cara membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberikan mereka kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan mereka sendiri. Berikut ini merupakan analisis pengelolaan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan Teori ACTORS diantaranya:

- a. *Authority*, mengacu pada pemberian wewenang kepada kelompok atau masyarakat untuk mengubah pendirian atau etos kerja mereka menjadi milik mereka sendiri. Ini membuat mereka merasa bahwa perubahan yang terjadi adalah hasil dari keinginan mereka sendiri untuk mencapai kemajuan.
- b. *Confidence and competence*, yaitu menimbulkan rasa percaya diri dengan melihat kemampuan mereka untuk dapat merubah keadaan.
- c. *Trust*, yaitu mengacu pada penanaman keyakinan bahwa mereka memiliki potensi untuk membuat perubahan dan harus mampu melakukannya.
- d. *Oppurtunities*, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih apa yang mereka inginkan, memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka dan wilayahnya.
- e. *Responsibilities*, yaitu perubahan harus dilakukan melalui pengelolaan dengan penuh tanggung jawab agar perbaikan dapat tercapai dengan sebaik-sebaiknya.
- f. *Support*, menekankan perlunya bantuan dari berbagai pihak untuk mencapai perbaikan. Dukungan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis) secara bersamaan tanpa dominasi dari satu pihak atau faktor tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yang merupakan pendeskripsian suatu obyek, fenomena, *setting social* yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018). Dengan fokus penelitian

pada pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan BUMDesma SBMS Lkd Kecamatan Sumberrejo berdasarkan Teori ACTORS menurut Sarah Cook dan Steve Macaulay. Yang mana Lokasi penelitian beralamat di Jl. Sikatan Nomor 333 Sumberrejo, Bojonegoro yang tempatnya berada dilingkup Kecamatan Sumberrejo. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan pengumpulan didapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya digunakan Model Analisis Data Interaktif oleh Miles dan Huberman diantaranya Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis (Hidayat & Warsono, 2020). Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya (Ginting et al., 2022). Berikut penjelasan mengenai hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan pada BUMDesma SBMS Lkd Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro menggunakan Teori ACTORS oleh Sarah Cook and Steve Macaulay:

### **1. Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Authority (Wewenang)**

Wewenang pada dasarnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat memiliki kedudukan yang penting karena jika dikelola dengan baik dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan partisipasi, transparansi, serta akuntabilitas. Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) SBMS Lkd memiliki wewenang dalam menjalankan fungsinya untuk memberdayakan masyarakat desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2021. Dalam proses observasi dan wawancara ditemukan bahwa pendirian BUMDesma yang merupakan transformasi dari Eks PNPM-Mpd harus disetujui secara Bersama-sama oleh berbagai pihak mulai sosialisasi oleh Dinas PMD Kabupaten, pemerintah kecamatan hingga desa melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) dan masyarakat turut serta dilibatkan seperti kelompok usaha SPP.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu (Alif Aulia, D. et al., 2023) bahwasannya perlu membangun manusia/masyarakatnya tujuannya agar mereka dapat menyesuaikan pikiran dan tindakannya dengan perubahan yang terjadi, memiliki rasa tanggung jawab, dan ikut memelihara hasil upaya atau hasil Sehingga tentunya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat desa dan juga pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat dan

pemerintah desa beserta jajarannya untuk mengelola . Dengan perencanaan program-program yang dapat secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dan agar dapat menciptakan produktifitas masyarakat.

Indikator wewenang ini membantu menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada agar sesuai dengan tujuan dan fungsinya yaitu untuk mencapai kemandirian dan dapat mengembangkan perekonomian serta memberikan dampak positif bagi masyarakat desa-desa. Dalam wewenangnya juga perlu keterbatasan agar tidak adanya konflik agar tidak menghambat berjalannya program

## **2. Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Confidence and Competence (Rasa Percaya Diri Dan Kemampuan)**

Pemberdayaan masyarakat yang efektif harus dilandaskan pada peningkatan kepercayaan diri dan kemampuan individu dan kelompok. Langkah ini dilakukan BUMDesma SBMS Lkd dengan melakukan pembinaan dalam hal ini Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang merupakan transformasi Eks PNPM-Mpd kepada kelompok usaha di tiap-tiap desa dengan jumlah perkelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, masyarakat (anggota kelompok) masih kurang jika dilakukan pembinaan saja yang dilaksanakan 10 bulan sekali. Hal ini dibuktikan memang saat pembinaan diwajibkan bukti kehadiran. Akan tetapi dalam hal ini pinjaman modal kebanyakan digunakan untuk kebutuhan keluarga. Sehingga harapannya setelah menjadi BUMDesma kelompok beserta anggotanya dapat mengelola modal tersebut untuk mengembangkan usaha dan potensi yang dimiliki. Karena itu, pembinaan kelompok mendorong masyarakat untuk bekerja sama, berbagi pengalaman, dan saling mendukung, yang pada akhirnya meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan mereka untuk melakukan perubahan positif dalam komunitas mereka. Dengan pembinaan yang tepat, kelompok-kelompok masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan komunitas mereka.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu (Alif Aulia, D. et al., 2023) yaitu setiap kegiatan dalam hal ini pemberdayaan masyarakat harus ada pengelolanya. Dalam rangka mempercepat proses pemenuhan kebutuhan masyarakat bahwasannya dapat menggandeng kelompok masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dengan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui usaha ataupun kegiatan sosial.

Setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat harus ada pengelolanya. Dalam hal ini kelompok masyarakat menjadi landasan penting bagi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada kemandirian, partisipasi aktif, dan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan perekonomian masyarakat.

### **3. Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Trust (Keyakinan)**

Indikator keyakinan dalam hal ini sebagai potensi untuk berubah menjadi lebih baik yaitu dalam menjalankan usaha dan pengelolaannya. Temuan yang dihasilkan yaitu masyarakat belum memiliki keyakinan dalam pembentukan unit usaha. Karena tenggang waktu dari transformasi yang baru akhir 2023, sehingga dari BUMDesma SBMS Lkd juga kesulitan dalam mengembangkannya.

Dalam penelitian terdahulu (Alif Aulia, D. et al., 2023) juga Pemberdayaan masyarakat ini membantu masyarakat memperoleh kekuatan untuk membuat keputusan dan menentukan tindakan apa yang harus mereka lakukan, termasuk mengurangi dampak hambatan sosial dan pribadi agar memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan langkah atau kegiatan masyarakat itu mengajak kelompok masyarakat untuk meningkatkan kapasitas melalui usaha-usaha.

Sehingga jika ada keyakinan/kepercayaan yang kuat di antara anggota masyarakat, pemimpin, institusi, sumber informasi, dan pada kemampuan diri sendiri maka proses pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif dan berkelanjutan. Sehingga akan membuat lingkungan yang baik untuk bekerja sama, berpartisipasi, dan membuat keputusan untuk memberikan dorongan atau dampak yang positif bagi mereka.

### **4. Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Opportunities (Kesempatan)**

Kelompok masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut serta mengelola dan partisipasi aktif terhadap BUMDesma SBMS Lkd akan tetapi keinginan tersebut belum berjalan dengan maksimal. Ada 2 unit usaha yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kerjasama Bulog. Usaha kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang seluruh anggotanya adalah perempuan diterima dengan baik karena dapat digunakan untuk mengembangkan usaha. Ternyata ada hambatan seperti perencanaan usaha karena potensi di kecamatan sumberrejo banyak industry atau usaha-usaha perekonomian sehingga BUMDesma tidak memiliki ruang untuk mendirikan usaha dan juga usaha partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam mendukung kemajuan unit usaha serta terbatasnya modal usaha dan kemitraan sehingga BUMDesma terbatas dalam membuat unit usaha baru.

Dalam penelitian terdahulu (Alif Aulia, D. et al., 2023) sama halnya yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daripada pemberdayaan masyarakat. Seperti memberi kesempatan untuk memilih pekerjaan yang mereka pikir mereka mampu lakukan tetapi ada yang terbatas dan tidak meluas. Hal ini diberlakukan agar mereka memiliki kemampuan yang lebih besar dan memaksimalkan potensi didesa-desa. Tujuannya adalah agar masyarakat yang mengelola program pemberdayaan ini



tidak merasa terbebani dan tidak menyalahgunakan peluang untuk memaksimalkan potensi mereka. Masyarakat diharapkan dapat mengelola program pemberdayaan ini secara efektif dan efisien.

#### **5. Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Responsibilities (Tanggungjawab)**

Selama masa keberjalanannya setelah bertransformasi, BUMDesma SBMS Lkd Kecamatan Sumberrejo dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaannya telah melakukan upaya perencanaan pengembangan usaha, pembinaan, pengawasan, evaluasi. Tentunya dalam pemberdayaan masyarakat tanggung jawab sangat penting dilakukan baik dari BUMDesma sendiri dan juga masyarakat. Sebagai pengelola keduanya sama-sama memiliki tugas untuk mengelola usaha dengan memanfaatkan potensi sekitar. Tanggung jawab dimaksudkan dengan melakukan pekerjaan yang diberikan kesempatan oleh BUMDesma dengan tidak merasa terbebani sehingga dapat menjalankannya dengan enjoy karena usaha-usaha yang dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang merupakan langkah untuk mencapai kesejahteraan perekonomian. Indikator tanggung jawab dari BUMDesma sudah dijalankan dengan baik, hal ini dikarenakan setiap bulan ada rapat atau musyawarah dengan pengelola BUMDesma SBMS Lkd.

Hal ini dilakukan karena dalam proses pemberdayaan masyarakat harus dilandaskan dengan transparan dan akuntabilitas agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kerjasama dan sinergi yang solid antara seluruh pihak, termasuk pemerintah desa, pengurus BUMDesma, dan masyarakat, menjadi kunci sukses dalam mewujudkan BUMDesma yang ideal. Menurut peneliti, fokus dari BUMDesma yang memperkuat kelembagaan tentunya pengurus BUMDesma memiliki tanggung jawab mengenai keputusan dan kegiatan terhadap pemberdayaan masyarakat agar masyarakat juga merasa diberdayakan dalam pengelolaan BUMDesma. Tidak hanya itu, masyarakat juga sebagai pengelola sehingga keduanya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya agar terbentuk usaha-usaha yang dapat menstabilkan angka kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat

#### **6. Pemberdayaan Masyarakat dengan Indikator Support (Dukungan)**

Dukungan dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) sangat penting karena berbagai alasan yang menyangkut efektivitas, keberlanjutan, dan keberhasilan jangka panjang dari inisiatif tersebut. Yang ditemukan dilapangan terkait BUMDesma SBMS Lkd ini memiliki dukungan dari pihak internal (pemerintah desa) dan eksternal (Bulog) dan terkait dari Dinas PMD . Kenyataannya dukungan pihak internal dan eksternal masih kurang jika ingin mendirikan unit usaha baru. Karena

pendirian usaha baru tidak melibatkan modal yang sudah dimiliki dari usaha sebelumnya melainkan dari penyertaan modal dari pihak internal dan eksternal tersebut.

Dalam penelitian terdahulu (Alif Aulia, D. et al., 2023) terkait dukungan masyarakat menunggu sebuah pemberdayaan yang baik dan meluas kepada masyarakat.

Yang patut diicermati terkait indikator tanggung jawab bahwasannya dapat diklasifikasikan dengan dukungan yang kuat dari instansi dalam program pemberdayaan masyarakat baik BUMDesma maupun pemerintah desa. Harapannya supaya masyarakat desa dapat diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan. Secara ekonomi, mereka difasilitasi untuk mengembangkan usaha dengan mendapat akses permodalan, serta meningkatkan keterampilan kewirausahaan pada ekonomi produktif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

BUMDesma SBMS Lkd menjalankan program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pengelolaan BUMDesma terkait usaha yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat menjadi alat yang efektif untuk pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan desa. Dengan pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, BUMDesma SBMS Lkd dapat mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam hal ini upaya yang telah dilakukan pada fokus penelitian berdasarkan Teori Sarah Cook and Steve Macually yaitu *Authority* (wewenang), *Confidence and competence* (rasa percaya diri dan kemampuan), *Trust* (keyakinan), *Opportunities* (kesempatan), *Responsibilities* (tanggung jawab), *Support* (dukungan) adalah dengan memberikan kewenangan pada masyarakat melalui pemberian pinjaman modal dan membangun partisipasi, rasa percaya diri dan kemampuan dengan menyediakan pembinaan sebagai upaya pengembangan usaha bagi para peminjam, keyakinan terhadap modal awal BUMDesma untuk dapat dikelola dan dikembangkan dengan adanya unit usaha baru, Kesempatan tidak hanya melalui pembinaan dilakukan terhadap pengurus kelompok dan anggota tentang mengelola usaha, Tanggungjawab BUMDesma terhadap pengelolaan kegiatan yang diberikan masyarakat, serta perlunya dukungan baik dari pemerintah maupun masyarakat karena keduanya sangat berpotensi dalam kesuksesan jalannya BUMDesma SBMS Lkd.

Dari upaya BUMDesma lakukan masih perlu adanya beberapa hal yang harus dikembangkan dan ditingkatkan terkait dengan peneglolaan BUMDesma. Karena sumber daya yang kurang, Kurangnya akses terhadap pasar dan permodalan, Kurangnya pemahaman

masyarakat tentang BUMDesma. Dengan menambah proses mengenalkan dan pemahaman masyarakat karena sudah bertransformasi dan memberikan dukungan baik sarana dan prasaranana yang dapat menunjang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaannya dapat optimal oleh pada kegiatan atau program BUMDesma ini.

### **Saran**

Berdasarkan observasi dan wawancara terkait Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) SBMS Lkd, maka peneliti menuliskan saran sebagai berikut:

1. Bagi BUMDesma sebaiknya lebih ditekankan kedudukan antara pengurus dan masyarakat seperti apa dalam program pemberdayaan ini.
2. Dilakukan penambahan workshop atau pelatihan kepada kelompok masyarakat selain pembinaan kepada kelompok usaha Simpan Pinjam Perempuan (SPP) supaya dalam pengelolaannya bisa lebih optimal.
3. Lebih dapat mengenali potensi wilayahnya lebih mendalam dengan pendekatan kepada masyarakat.
4. Bagi BUMDesma dan Pengurus atau Pengelola sebaiknya berkolaborasi dengan BUMDesa untuk mengembangkan usaha dan mendirikan unit usaha baru agar masyarakat lebih mengenal dan paham terkait program daripada BUMDesma ini.
5. Bagi BUMDesma dan Pengurus atau Pengelola sebaiknya berkolaborasi dengan BUMDesa untuk mengembangkan usaha dan mendirikan unit usaha baru agar masyarakat lebih mengenal dan paham terkait program daripada BUMDesma ini.
6. Bagi kelompok masyarakat baik yang tergabung dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) atau tidak sebaiknya lebih berpartisipasi dan mendukung program ini dengan menawarkan hasil usahanya kepada BUMDesma karena keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Albi Anggito, & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ella Deffi Lestari, Ed.). CV Jejak.
- Alif Aulia, D., Gun Gumilar, G., Panji Teguh Santoso, M., Priyanti, E., Karawang, S., Karawang, K. and Jawa Barat, P. (2023), *Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Pembangunan Desa di, JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary E-ISSN, 1(2), 568.*

- Ginting, S., Sembiring, R., Arlina, A., Dewi, E., & Rudi Kristian, P. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Kolam Soda Desa Buluh Naman Kecamatan Munte Kabupaten Karo. *Jurnal Pengabdian Nasional*, 2(02), 30–39.
- Hardiansyah, R., Nurwati, R. N., & Taftazani, B. M. (2023). KEBERHASILAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI (PRSE) DESA TARUNAJAYA. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(1), 125. <https://doi.org/10.24198/focus.v6i1.40141>
- Hidayat, F. A., & Warsono, H. (2020). Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Delta Mulia Di Desa Panempan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 27–38. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.189>
- Maani, D.K. (2011), Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat, *Demokrasi*, X(1), 53–66.
- Nabila, F., Budi, S. and Ansyari, M. (2022), Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, *Administrasi PublikJurnal*, 3(April 2022), 6–12.
- Nugraha, M. N. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KELOMPOK TANI LEBAH MADU TERATAI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi di Kampung Sindangsuka Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya). *Repositori Universitas Siliwangi*.
- Ramadani, R., & Revida, E. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Professional*, 9(2), 375–382.
- Satu Desa Bojonegoro. (2023). *Indeks Desa Membangun*.